

Studi Komparatif Sistem Pendidikan Di Inggris, Belanda dan Jerman

Ahmad Zulfikar Fatah,^{1*} Agustina Alvi Gunawan

¹² IAIN Ponorogo

Article History

Received: 03/07/2025

Revised: 14/08/2025

Accepted: 19/09/2025

Published: 09/10/2025

Keywords

Education System; Educational Comparison; United Kingdom; Netherlands; Germany.

*Corresponding Author:

zulfikarfatah1@gmail.com

DOI: <https://doi.org/xx.xxxx/xxx.xxx>

In an effort to improve the quality of human resources, education serves as one of the main pillars of sustainable societal development. This comparative study examines the education systems in the United Kingdom, the Netherlands, and Germany, focusing on each country's unique approach to managing education and the comparative outcomes that can enhance educational practices in other nations, including Indonesia. The analysis reveals that the education systems in these three countries, shaped by history, culture, and government policies, exhibit distinct characteristics. The United Kingdom implements a structured education system with national examinations, while the Netherlands emphasizes flexibility and inclusive education, and Germany adopts a dual education model that has successfully reduced youth unemployment. This study also provides recommendations for educational development in Indonesia based on the findings.



Copyright © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC 4.0) license.

Pendahuluan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Memahami pendidikan di berbagai negara secara global menjadi semakin penting. Studi komparatif ini berkonsentrasi pada sistem pendidikan di Inggris, Belanda, dan Jerman, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengelola pendidikan, serta hasil yang dapat dibandingkan untuk meningkatkan wawasan dan praktik terbaik dalam pendidikan. Studi ini membahas pentingnya tema perbandingan sistem pendidikan, terutama di era globalisasi di mana pertukaran informasi dan praktik pendidikan semakin penting. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang cara-cara negara-negara ini mengatur dan menerapkan sistem pendidikannya, kita dapat mengambil pelajaran penting yang dapat diterapkan untuk sistem pendidikan di negara lain, seperti Indonesia.

Hasil penelitian literatur menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Inggris, Belanda, dan Jerman memiliki ciri-ciri unik, yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kebijakan pemerintah (OECD, 2019). Sistem pendidikan di Inggris terbagi menjadi empat tahap utama: pendidikan dasar (*primary education*), pendidikan menengah (*secondary education*), pendidikan lanjutan (*further education*), dan pendidikan tinggi (*higher education*) (Machin, 2005). Sebaliknya, model dual education yang terkenal di Jerman berhasil menurunkan tingkat

pengangguran di kalangan pemuda karena menggabungkan pendidikan teori dan Latihan (Barbel, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di ketiga negara ini dengan melakukan analisis komparatif. Selain itu, ia menawarkan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Jurnal, laporan, dan studi kasus yang relevan akan digunakan untuk melakukan analisis ini.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di ketiga negara ini dengan melakukan analisis komparatif. Selain itu, itu juga akan memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Untuk melakukan analisis ini, jurnal, laporan, dan studi kasus yang relevan akan digunakan.

Data dikumpulkan dengan mencari, menyeleksi, dan menganalisis sumber yang dapat dipercaya yang mendukung diskusi tentang sistem pendidikan di masing-masing negara. Sumber-sumber tersebut meliputi kebijakan pendidikan, kurikulum, sistem evaluasi, jenjang pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Inggris, Jerman, dan Belanda..

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan di Inggris

Sejarah lembaga pendidikan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris (juga dikenal sebagai Inggris) mulai tercatat sejak akhir abad ke-6 Inggris Anglo-Saxon. Pada tahun 598, sebuah grammar school di Canterbury, England, diperkirakan adalah sekolah pertama di Inggris. Sejak 1960, sejarah pendidikan di Britania Raya berkembang dari bidang studi yang kurang dihargai menjadi disiplin akademik yang lebih mapan. Pada 1960-1975, perkembangan ini ditandai dengan berdirinya *History of Education Society* (HES) dan jurnal *History of Education*, yang berfokus pada hubungan pendidikan dengan masyarakat, terutama dalam konteks perjuangan kelas. Namun, pada 1975-2000, sejarah pendidikan mulai kehilangan perannya dalam pendidikan guru dan lebih beralih ke penelitian akademik dengan kajian yang semakin spesifik, seperti pendidikan perempuan, perubahan kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Meskipun publikasi jurnal meningkat, bidang ini semakin terisolasi dari praktik pendidikan. Memasuki abad ke-21, sejarah pendidikan semakin bersifat internasional dan multidisipliner, mencakup topik seperti gender, kolonialisme, serta sejarah siswa dan pembelajaran. Tantangan terbesar saat ini adalah mempertahankan relevansinya di tengah kebijakan pendidikan yang semakin berorientasi pada praktik langsung di sekolah (McCulloch, 2020).

Sekolah di Inggris memulai tahun ajaran baru pada tanggal 1 September (kecuali pada hari libur, yang dipindah ke tanggal 2 atau 3). Kurikulum nasional di England mengatur pra-primer, pendidikan primer, dan pendidikan sekunder. Pengaturan ini didasarkan pada *Undang-Undang Pendidikan 2002, Bab 32*. Tidak ada kurikulum yang ditetapkan untuk pendidikan tinggi dan pendidikan lanjutan. Setiap kualifikasi memiliki program pembelajaran unik karena beragamnya kualifikasi yang ada di jenjang pendidikan pasca 16 tahun. Pada tahap ini, siswa

dianggap cukup dewasa untuk membuat pilihan mereka sendiri. Beberapa kualifikasi menawarkan persiapan sebelum masuk ke universitas, beberapa menawarkan pelatihan keterampilan praktis sehingga Anda dapat langsung bekerja setelah itu, dan sebagainya. Struktur dasar sistem pendidikan di Inggris terdiri dari lima jenjang, yaitu: (*pertama*) pendidikan pra-primer untuk anak usia 3-4 tahun, (*kedua*) pendidikan primer bagi anak usia 4-11 tahun, (*ketiga*) pendidikan sekunder untuk usia 11-16 tahun, (*keempat*) pendidikan lanjutan pada usia 16-18 tahun, dan (*kelima*) pendidikan tinggi bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun (Irma, 2023).

Di Inggris, sistem kurikulum nasional diterapkan terutama untuk sekolah-sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah, sehingga ada sistem ujian nasional. Sistem Nasional Kurikulum berlaku untuk pendidikan primer dan sekunder. Di akhir setiap tingkatan, diadakan ujian *National Curriculum Test* (NCT) dan *Key Stage Test* (KST). Ujian nasional *General Certificate of Secondary Education* (GCSE) biasanya diberikan di akhir jenjang sekunder. Setelah tahap ini, sebagian besar siswa beralih ke pendidikan lanjutan untuk mempersiapkan ujian AS (*Advanced Subsidiary*)-Level dan A2-Level yang dikombinasikan menjadi A (*Advanced*)-Level sebagai persiapan untuk memasuki universitas atau perguruan tinggi.

Di Inggris, staf pengajar bukan pegawai negeri sipil, tetapi direkrut oleh pemerintah daerah atau lembaga tergantung jenis sekolahnya. Staf di sekolah swasta menjadi pegawai lembaga tersebut. Untuk mengajar di sekolah pemerintah, guru harus memiliki sertifikasi *Qualified Teacher Status* (QTS), yang bisa diperoleh melalui dua jalur: beruntun (*consecutive*) bagi lulusan sarjana dengan pelatihan akademik *Postgraduate Certificate in Education* (PGCE) dan profesional (QTS), atau bersamaan (*concurrent*) melalui program sarjana tiga hingga empat tahun yang menggabungkan studi akademik dan praktik mengajar. Untuk tingkat pendidikan lanjutan (*further education*), staf pengajar harus memiliki kualifikasi profesional seperti *Qualified Teacher Learning and Skills* (QTLS) atau *Associate Teacher Learning Skills* (ATLS). Sementara itu, di pendidikan tinggi (*higher education*), pelatihan untuk staf pengajar tidak wajib, tetapi bisa menjadi syarat kontrak kerja. Sertifikasi untuk pengajar di tingkat ini disebut *Postgraduate Certificate in Higher Education* (PCGHE) dan diakreditasi oleh *Higher Education Academy* (HEA) (Fauzi, tt).

Pendidikan di Belanda

Pada abad ke-20, sistem pendidikan di Belanda terus mengalami perubahan dengan penekanan pada aksesibilitas dan kualitas. Salah satu langkah penting adalah diperkenalkannya Undang-Undang Sekolah tahun 1920, yang memberikan subsidi kepada sekolah swasta dengan syarat mereka memenuhi standar tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi orang tua dalam memilih pendidikan bagi anak-anak mereka, baik di sekolah negeri maupun swasta, tanpa kendala finansial. Selain itu, sistem pendidikan menengah juga berkembang dengan diperkenalkannya berbagai jalur pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, termasuk pendidikan akademik dan kejuruan.

Pada tahun 1968, diperkenalkan Undang-Undang Mammoet yang mereformasi pendidikan menengah dengan menyusun struktur yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Sistem ini memperkenalkan tiga jalur utama, yaitu pendidikan menengah umum (HAVO), pendidikan pra-universitas (VWO), dan pendidikan kejuruan

menengah (MBO). Undang-undang ini memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa untuk berpindah jalur sesuai dengan perkembangan akademik dan minat mereka. Sejak saat itu, sistem pendidikan di Belanda menjadi lebih inklusif dengan berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Memasuki abad ke-21, Belanda semakin menekankan inovasi dalam pendidikan, termasuk penerapan teknologi dalam pembelajaran dan penguatan kurikulum berbasis kompetensi. Reformasi pendidikan terus berlanjut dengan meningkatkan fleksibilitas dalam jalur pendidikan dan memperluas program pendidikan internasional untuk menarik siswa dari berbagai negara. Selain itu, pendidikan tinggi di Belanda semakin berkembang dengan universitas-universitas yang menawarkan program dalam bahasa Inggris, menjadikannya salah satu destinasi pendidikan favorit di Eropa.

Pendidikan di Belanda juga dikenal dengan pendekatannya yang berorientasi pada siswa, di mana sistem pengajaran lebih interaktif dan mendorong kemandirian dalam belajar. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dibandingkan instruktur, memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam mengeksplorasi dan memahami materi pelajaran. Selain itu, sistem evaluasi lebih menekankan pada pemahaman konsep dibandingkan sekadar hafalan, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem-solving yang lebih baik.

Saat ini, sistem pendidikan di Belanda terus mengalami pembaruan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Fokus pada pendidikan inklusif dan multikultural menjadi prioritas, mengingat populasi yang semakin beragam akibat globalisasi dan imigrasi. Dengan kebijakan pendidikan yang terus berkembang, Belanda berhasil mempertahankan reputasinya sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kesiapan menghadapi dunia kerja (Wahid, 2022).

Sistem hukum pendidikan di Belanda semakin diperkuat dengan berbagai undang-undang yang memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua warga negara. Selain Konstitusi, Undang-Undang Pendidikan Dasar (Primary Education Act) mengatur kurikulum nasional, standar evaluasi, serta hak dan kewajiban siswa serta tenaga pendidik. Pendidikan dasar bersifat wajib bagi anak-anak berusia 5 hingga 16 tahun, dengan pengawasan ketat dari pemerintah untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang layak. Di tingkat menengah dan tinggi, undang-undang pendidikan menyesuaikan struktur pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan kejuruan dan akademik. Selain regulasi nasional, Belanda juga mengacu pada peraturan Uni Eropa dan kesepakatan internasional yang berkaitan dengan hak atas pendidikan. Pemerintah memastikan bahwa prinsip inklusivitas diterapkan dalam sistem pendidikan, termasuk dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus serta kebijakan untuk menangani kesenjangan sosial dalam pendidikan. Dengan kerangka hukum yang kuat, sistem pendidikan di Belanda tetap fleksibel dan inovatif, memungkinkan perkembangan kurikulum yang adaptif serta penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan global (Isawdi, 2023).

Kurikulum pendidikan di Belanda dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam mengembangkan potensi akademik maupun keterampilan praktis mereka. Pendidikan dasar berlangsung selama delapan tahun, dimulai pada usia empat atau lima tahun, dan

mencakup berbagai mata pelajaran inti seperti bahasa Belanda, matematika, sains, seni, serta pendidikan jasmani. Pada tahun terakhir pendidikan dasar, siswa mengikuti asesmen yang membantu menentukan jalur pendidikan menengah yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat mereka.

Pendidikan menengah di Belanda terbagi menjadi tiga jalur utama, yaitu VMBO, HAVO, dan VWO. VMBO berfokus pada keterampilan kejuruan dan berlangsung selama empat tahun, memberikan dasar bagi siswa yang ingin melanjutkan ke pendidikan menengah kejuruan (MBO) atau langsung memasuki dunia kerja. HAVO berdurasi lima tahun dan menjadi jalur bagi siswa yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi terapan (HBO). Sementara itu, VWO berlangsung selama enam tahun dan diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke universitas (WO), dengan fokus pada pembelajaran akademik yang lebih mendalam.

Sistem ujian di Belanda berperan dalam menentukan jalur pendidikan lebih lanjut. Siswa VMBO, HAVO, dan VWO mengikuti ujian nasional sebagai syarat kelulusan dan penentuan kelanjutan studi mereka. Hasil ujian VWO menjadi salah satu faktor utama dalam penerimaan mahasiswa di universitas, sementara siswa HAVO dan VMBO dapat melanjutkan ke institusi pendidikan yang sesuai dengan jalurnya. Selain ujian nasional, evaluasi berkala juga dilakukan oleh sekolah untuk memantau perkembangan akademik siswa sepanjang tahun.

Selain kurikulum yang beragam, kesejahteraan guru di Belanda menjadi perhatian utama pemerintah. Guru diharuskan memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan. Gaji seorang Guru di wilayah Amsterdam, Belanda adalah dengan gaji rata-rata €52.000 per tahun. Investasi ini mencerminkan komitmen Belanda terhadap peningkatan standar pengajaran serta kesejahteraan tenaga pendidik, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Belanda menonjol karena pendekatannya yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Dengan adanya penjurusan sejak dini, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Selain itu, dukungan finansial dari pemerintah bagi semua sekolah, baik negeri maupun swasta, memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara. Pendekatan ini membuat sistem pendidikan Belanda menjadi salah satu yang paling inklusif dan adaptif di dunia (Saputra, 2021).

Pendidikan di Jerman

Sistem pendidikan di Jerman berkembang dari tradisi sekolah gereja pada Abad Pertengahan hingga menjadi sistem yang lebih terstruktur dan diawasi oleh negara. Universitas pertama di Jerman, Universitas Heidelberg, didirikan pada tahun 1386 dan diikuti oleh universitas lain seperti di Cologne dan Leipzig. Pada periode ini, pendidikan tinggi di Jerman masih sangat dipengaruhi oleh gereja, baik Katolik maupun Protestan, yang membentuk kurikulum dan metode pembelajaran berdasarkan ajaran agama mereka. Namun, pengaruh gereja dalam pendidikan mulai mengalami perubahan seiring dengan perkembangan intelektual di Eropa.

Pada abad ke-16, Reformasi Protestan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther mempercepat pendirian universitas-universitas baru yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan teologi tetapi juga sains dan filsafat. Perbedaan ideologi antara Katolik dan Protestan menciptakan garis pemisah dalam pendidikan, di mana sekolah-sekolah Protestan cenderung menekankan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pendidikan di Jerman tetap berkembang dengan mempertahankan standar akademik yang tinggi, terutama dalam bidang penelitian dan ilmu pengetahuan.

Perubahan besar terjadi pada abad ke-18 ketika Prusia menjadi pelopor dalam pendidikan wajib. Pada tahun 1763, Prusia mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan anak-anak berusia 5 hingga 14 tahun untuk bersekolah, menjadikan sistem pendidikan lebih inklusif dan terorganisir. Pemerintah mengambil peran lebih besar dalam pengawasan sekolah dasar, mengurangi pengaruh gereja, serta memastikan bahwa pendidikan menjadi hak bagi semua lapisan masyarakat. Langkah ini mencerminkan pergeseran dari sistem pendidikan berbasis agama menuju pendidikan yang lebih berorientasi pada pembangunan intelektual dan sosial.

Pada awal abad ke-19, Wilhelm von Humboldt memimpin reformasi pendidikan yang semakin memperkuat peran negara dalam sistem pendidikan Jerman. Humboldt menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membentuk individu yang berpengetahuan, bermoral, dan mampu berpikir kritis. Ia juga mengembangkan konsep pendidikan tinggi modern dengan menekankan hubungan antara penelitian dan pengajaran, yang kemudian menjadi dasar bagi sistem universitas di seluruh dunia. Model universitas berbasis riset yang diperkenalkan Humboldt masih menjadi standar dalam banyak institusi akademik global hingga saat ini.

Hingga kini, sistem pendidikan Jerman tetap mempertahankan struktur yang kuat dengan menyeimbangkan antara pendidikan akademik dan kejuruan. Pendidikan di Jerman terkenal dengan sistem dual, yang memungkinkan siswa untuk memilih antara jalur akademik atau kejuruan sejak pendidikan menengah. Dengan sejarah panjang yang kaya akan inovasi dan reformasi, Jerman terus menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi global (Irma, 2020).

Dasar hukum pendidikan di Jerman didasarkan pada Artikel 7 Konstitusi (Grundgesetz) Republik Federal Jerman, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara bagian (Länder). Hal ini berarti setiap dari 16 negara bagian memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang pendidikan mereka sendiri, termasuk pengelolaan kurikulum, struktur sekolah, serta sistem evaluasi. Dengan sistem desentralisasi ini, terdapat variasi dalam pendekatan pendidikan di berbagai negara bagian, meskipun tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Meskipun masing-masing negara bagian memiliki otonomi dalam mengatur pendidikan, pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam menetapkan pedoman umum, terutama dalam pendidikan tinggi. Hochschulrahmengesetz (Undang-Undang Kerangka Pendidikan Tinggi) mengatur standar pendidikan universitas dan penelitian ilmiah agar tetap sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan global. Selain itu, terdapat kesepakatan antarnegara bagian melalui Konferensi Menteri Pendidikan (Kultusministerkonferenz) untuk memastikan adanya

keselarasan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk pengakuan ijazah dan standar akademik yang seragam.

Dalam pelaksanaannya, sistem pendidikan di Jerman juga menjunjung prinsip kebebasan akademik dan keberagaman pilihan jalur pendidikan. Masyarakat memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik di sekolah negeri maupun swasta, asalkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kombinasi antara desentralisasi, regulasi nasional, serta kebebasan akademik, sistem pendidikan di Jerman tetap adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman dan memastikan kualitas pendidikan yang tinggi bagi seluruh warganya (Huldayanti, 2022).

Sistem pendidikan di Jerman memiliki kurikulum yang terstruktur dengan jenjang yang jelas untuk setiap tahap perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) bersifat opsional dan berfokus pada pengembangan keterampilan sosial serta pengenalan dasar-dasar akademik seperti matematika, bahasa, dan seni. Banyak anak mengikuti program di taman kanak-kanak (Kindergarten) sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar lebih siap secara sosial dan kognitif ketika memasuki jenjang sekolah dasar.

Pendidikan dasar (Grundschule) berlangsung selama empat tahun, dimulai pada usia enam tahun. Kurikulum di tingkat ini mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Jerman, matematika, sains, dan studi sosial. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa diarahkan ke berbagai jalur pendidikan menengah berdasarkan minat, kemampuan akademik, serta rekomendasi dari guru. Proses ini sangat menentukan arah pendidikan dan karier siswa di masa depan. Pendidikan menengah di Jerman terbagi menjadi beberapa jalur, yaitu Gymnasium, Realschule, Hauptschule, dan Gesamtschule. Gymnasium merupakan jalur akademik yang mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi dan berlangsung hingga usia 18 tahun. Realschule menawarkan pendidikan menengah dengan fokus pada keterampilan kejuruan dan akademik tingkat menengah. Hauptschule lebih berorientasi pada pembelajaran praktis dan vokasi, sering kali diikuti dengan pelatihan kejuruan. Sementara itu, Gesamtschule mengintegrasikan ketiga jalur ini dalam satu institusi, memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam menentukan jalur pendidikan mereka. Sistem ujian di Jerman juga bervariasi sesuai dengan jalur pendidikan yang dipilih. Siswa di Gymnasium harus mengikuti ujian Abitur sebagai syarat masuk ke universitas. Sementara itu, siswa dari jalur vokasi mengikuti ujian sertifikasi yang relevan dengan bidang keahlian mereka. Sertifikasi ini memungkinkan mereka untuk langsung memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan lebih lanjut di institusi kejuruan atau politeknik.

Kualitas pendidikan di Jerman sangat bergantung pada kompetensi guru, yang umumnya memiliki kualifikasi tinggi dan mendapatkan gaji yang kompetitif. Gaji rata-rata guru di Jerman yaitu \$62.691 atau setara Rp 979.233.420 per tahun. Pemerintah Jerman mengalokasikan dana yang signifikan untuk pendidikan, memastikan bahwa sistem ini tetap berorientasi pada keterampilan dan inovasi. Struktur pendidikan yang jelas dan fleksibel memungkinkan siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan potensi mereka, menciptakan tenaga kerja yang kompetitif di berbagai sektor industri (Sugandi, 2024).

Kesimpulan

Sistem pendidikan di Inggris, Belanda, dan Jerman memiliki karakteristik unik yang mencerminkan sejarah, kebijakan, serta pendekatan masing-masing negara dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Inggris memiliki struktur pendidikan yang terorganisir dengan jenjang yang jelas, sistem kurikulum nasional yang ketat, serta ujian standar untuk memastikan kompetensi siswa. Sementara itu, Belanda lebih menekankan fleksibilitas pendidikan dengan berbagai jalur yang memungkinkan siswa mengembangkan minat dan bakatnya, serta sistem yang inklusif dan mendukung inovasi. Di sisi lain, Jerman terkenal dengan sistem dual yang mengombinasikan pendidikan akademik dan vokasi, serta pendekatan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan di setiap negara bagian.

Ketiga negara ini memiliki dasar hukum pendidikan yang kuat dan berorientasi pada kesejahteraan siswa serta tenaga pendidik. Inggris menetapkan kurikulum yang lebih terpusat pada pendidikan dasar dan menengah, sedangkan Belanda memastikan inklusivitas pendidikan dengan dukungan finansial bagi semua sekolah. Jerman, dengan sistem pendidikan berbasis desentralisasi, memberikan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan pendidikan di setiap wilayah. Meskipun memiliki perbedaan dalam struktur dan pelaksanaan, ketiga negara ini sama-sama menekankan kualitas pendidikan, kesiapan siswa menghadapi dunia kerja, serta kesejahteraan guru sebagai faktor utama dalam keberhasilan sistem pendidikan mereka. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, sistem pendidikan di Inggris, Belanda, dan Jerman menjadi model yang banyak diadopsi oleh negara lain. Ketiganya menunjukkan bahwa pendidikan yang baik tidak hanya bergantung pada kurikulum dan kebijakan, tetapi juga pada fleksibilitas, inovasi, serta dukungan yang diberikan kepada siswa dan tenaga pendidik. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

Referensi

- Fauzi, T A, dan T A Fauzi Soelaiman. "Sistem Pendidikan Di Inggris," t.t.
- Fürstenau, Bärbel, Matthias Pilz, dan Philipp Gonon. "The Dual System of Vocational Education and Training in Germany – What Can Be Learnt About Education for (Other) Professions." Dalam *International Handbook of Research in Professional and Practice-Based Learning*, disunting oleh Stephen Billett, Christian Harteis, dan Hans Gruber, 427–60. Springer International Handbooks of Education. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8902-8_16.
- Huldayanti, Kristanti. "Hubungan Pendidikan Agama Kristen dan Ilmu Humaniora Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Pendidikan Agama Kristen" 7 (6 Juni 2022): 19.
- Irma, Anggun, Mordiani Damanik, dan Tsalis Fadilah. "Sistem Pendidikan di Negara-Negara Eropa (Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda)," 29 November 2023, 8.
- Irma, Anggun, Mordiani Damanik, dan Tsalis Yaumil Fadilah. "Sistem Pendidikan di Negara Eropa (Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda)." *RAZIQ: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (30 November 2023): 102–9.

- Iswandi. "Sejarah Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," 2023, 8.
- Machin, Stephen, dan Anna Vignoles. *What's the Good of Education?: The Economics of Education in the UK*. Princeton University Press, 2005.
- McCulloch, Gary. "History of Education in Britain since 1960." *Histoire de l'éducation*, no. 154 (31 Desember 2020): 119–41. <https://doi.org/10.4000/histoire-education.5640>.
- OECD. *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. Education at a Glance. OECD, 2019. <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>.
- Saputra, Fedry. "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia" 3 (2021): 11.
- Sugandi, Rafid, Faras Azizah, Budi Darmawan, dan Diah Arvionita. "Sejarah Peradaban Islam: Menguak Keberadaan Minoritas Muslim Jerman" 16 (2024): 15.
- Wahid, Abdul. "Eksistensi dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda" 6 (3 Oktober 2022): 12.